



## INTISARI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum di bidang Hak Cipta yang dapat diberikan terhadap karya ukir masyarakat adat Bali baik yang dibuat oleh satu orang maupun lebih, bahan dan bentuk perlindungan terhadap karya ukir tersebut, dan hambatan yang timbul dalam upaya memberikan perlindungan terhadap karya ukir masyarakat adat.

Penyusunan tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara. Seluruh data dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Perlindungan hukum yang diberikan dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi hukum nasional yang tersebar dalam pasal-pasal UUHC, yang secara umum perlindungan tersebut diberikan terhadap hak moral dan hak ekonominya, apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, maka dapat dikenakan sanksi perdata, pidana maupun administrasi. Dari segi hukum adat perlindungan ditekankan pada usaha pelestarian budaya, dan akan timbul reaksi dari masyarakat adat apabila ada perbuatan yang melanggar kaedah hukum adat dan dapat dikenakan sanksi adat. Dari segi hukum internasional telah diadakan konverensi internasional membahas masalah perlindungan karya tradisional dimana HaKI sebagai alternatif sistem perlindungan. (2) Bentuk dan bahan karya ukir yang dapat dilindungi dalam UU tidak ada batasannya, asalkan karya tersebut mengandung unsur seni dan terkandung ciri khas daerah tertentu, tetapi dari masyarakat adat Bali, karya dengan bentuk yang disakralkan (sarana upacara) ada ketentuan yang membatasinya. (3) Hambatan dalam memberikan perlindungan karena minimnya pengetahuan masyarakat adat terhadap HaKI secara umum dan Hak Cipta secara khusus, kurangnya kesadaran mereka untuk mendaftarkan haknya, kurang jelasnya beberapa pasal UUHC yang cukup memberikan kesulitan pemahaman serta kurangnya sosialisasi HaKI dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Kata kunci : Perlindungan Hak Cipta, Kekayaan Intelektual Masyarakat adat, karya ukir



## ABSTRACT

The research aims to study legal protection for the copy rights of the carving creation by Balinese *adat* society, either by an individual or in group, the material and form of the creation to be protected, and the problems encountered in the implementation of such a protection.

The research combined a library research to obtain the secondary data and a field research to obtain the primary data. The field research was conducted through interviews. The data were analyzed qualitatively.

The research found that 1) the granted legal protection can be seen from 3 different points of view. From the National Law, some articles stipulated in the Laws of Copy Rights regulate that in general the protection should be given to the moral and economic rights and when there is a violation against it, a civil, criminal, or administrative sanction can be applied. From the customary law point of view, the protection is emphasized on cultural preservation and there will be reaction from the *adat* society against a particular conduct that violates their *adat* law principle, and consequently, a prescriptive sanction can be applied. From the International Law point of view, there was an international conference on issues concerning protection for traditional creation in which *HaKI* (Intellectual Property Rights) was decided to be an alternative protection system. 2) The form and material used in the carving to be protected by the law are not restricted as long as the creation bears artistic elements and local special characteristics. However, Balinese *adat* society put a prescriptive restriction on a creation that adopts a particular sacred form (used for rituals). 3) The problems encountered in the implementation of the copy rights protection include: the society's lack of knowledge on Intellectual Property Rights (*HaKI*) in general and Copy Rights in particular; lack of awareness to patent the rights; ambiguity in some articles of the Law of Copy Rights that cause difficulties in the understanding; and lack of socialization of the Intellectual Property Rights (*HaKI*) by the government and the legal enforcement apparatus.

Keywords: Copy Rights Protection, Intellectual Property of *Adat* Society, carving creation.